

Penyelarasan RPJMD-RPJMN 2015-2019



Workshop Tim Analisis Kebijakan Bappenas
Santika Hotel BSD City, Serpong, 22 April 2015

Dadang Solihin



Doktor Ilmu Pemerintahan dari Universitas Padjadjaran dan MA in Economics dari University of Colorado at Denver, USA ini adalah Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Sarjana Ekonomi Pembangunan FE Unpar ini sudah menghasilkan beberapa buku tentang Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan, dll.

Dadang Solihin adalah peserta terbaik Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XXIX tahun 2010 LAN-RI Jakarta dan peserta terbaik Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLIX tahun 2013 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI yang dinyatakan lulus Dengan Pujian serta dianugerahi Penghargaan Wibawa Seroja Nugraha.

Karya-karyanya tersebar di berbagai media terutama di media on-line. Silahkan email dadangsol@gmail.com HP 08129322202 web: <http://dadang-solihin.blogspot.com>

Materi

- Pilkada Serentak 2015
- Ruang Lingkup SPPN
- RPJM Daerah
- Peraturan terkait Penyelarasan Perencanaan Pusat dan Daerah
- Hubungan Dokumen Perencanaan Pusat dan Daerah
- Penyesuaian RPJMD terhadap RPJMN
- Perangkat Pelaksanaan Penyelarasan
- Simulasi Penyelarasan RPJMD-RPJMN
- Penyelarasan RPJMD-RPJMN dalam *Multilateral Meeting*





Pilkada Serentak 2015

Sumber: Kemendagri 2014



**PILKADA
SERENTAK
TAHUN 2015**

**PEMILIHAN
SECARA LANGSUNG
OLEH RAKYAT**

**BERDASARKAN
SUBSTANSI
PERPPU NOMOR 1
TAHUN 2014**

**PERPPU NO.1/2014
AKAN DIBAHAS OLEH
DPR-RI PADA BULAN
JANUARI 2015**

**DIHARAPKAN DAPAT
DITETAPKAN MENJADI
UNDANG-UNDANG
TENTANG PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI,
DAN WALIKOTA**

A. SKENARIO TAHAPAN PILKADA SERENTAK

**PEMILIHAN SERENTAK TAHAP PERTAMA
PADA TAHUN 2015 UNTUK PARA GUBERNUR,
BUPATI, DAN WALIKOTA YANG MASA JABATAN
BERAKHIR TAHUN 2015.**

**PEMILIHAN SERENTAK TAHAP KEDUA
PADA TAHUN 2018 UNTUK GUBERNUR, BUPATI,
DAN WALIKOTA YANG MASA JABATAN
BERAKHIR TAHUN 2016, 2017, DAN 2018.
→ 2016 & 2017 DIISI PENJABAT SAMPAI
DENGAN TERPILIH GUBERNUR, BUPATI, DAN
WALIKOTA DEFINITIF TAHUN 2018**

**PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN
WALIKOTA SERENTAK SECARA NASIONAL
PERTAMA KALI DIMULAI TAHUN 2020**

B. PROYEKSI TAHAPAN PILKADA SERENTAK



CATATAN : SUDAH TERMASUK 15 DOB TAHUN 2013 & 3 DOB TAHUN 2014.

Ruang Lingkup SPPN

- UU 25/2004 tentang SPPN mencakup landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik oleh **Pemerintah Pusat** maupun **Pemerintah Daerah**.



Tujuan SPPN

1. Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

RPJM Daerah

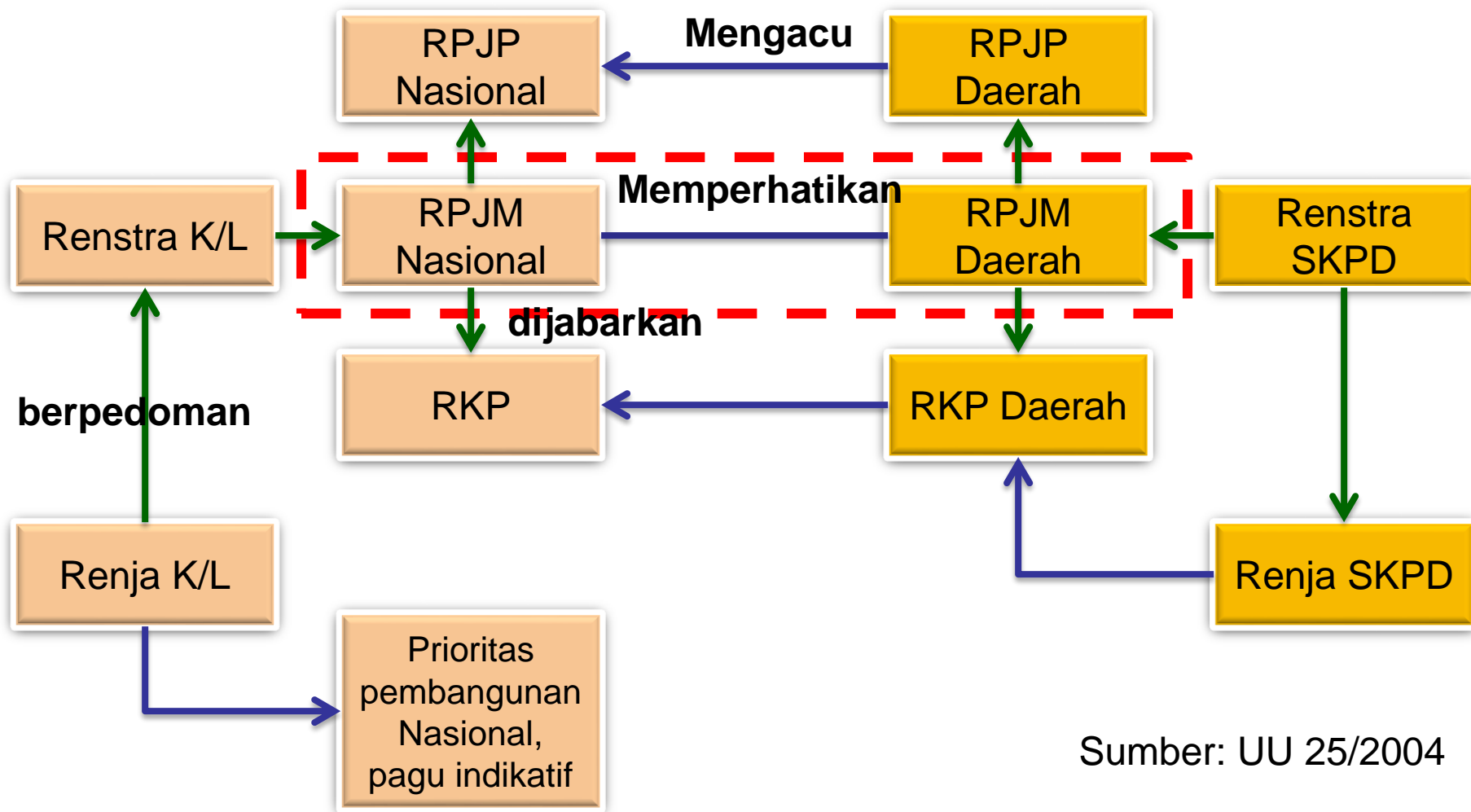
- **RPJM Daerah** merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah
- yang penyusunannya **berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional**,
- memuat:
 1. arah kebijakan keuangan Daerah,
 2. strategi pembangunan Daerah,
 3. kebijakan umum, dan
 4. program SKPD, lintas SKPD, dan
 5. program kewilayahan
- disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Sumber: Pasal 5 UU 25 Tahun 2004

Peraturan terkait Penyelarasan RPJMN dan RPJMD

No	Peraturan	SPPN	Pemerintahan Daerah
1.	Undang-Undang	UU 25/2004	<ul style="list-style-type: none">• UU 32/2004• UU 23/2014
2.	Peraturan Pemerintah	PP 40/2006	PP 8/2008
3.	Peraturan Menteri	Permen PPN 1/2014	Permendagri 54/2010
4.	Surat Edaran Bersama	0199/M PPN/04/2010	28/2010
5.	Peraturan lainnya	Juklak Sesmen PPN No. 3/Juklak/Sesmen/06/2014	

Hubungan Dokumen Perencanaan Pusat dan Daerah



Sumber: UU 25/2004

Kerangka RPJMD



1. Arah kebijakan keuangan daerah
2. Strategi pembangunan daerah
3. Kebijakan umum
4. Program satuan kerja perangkat daerah
5. Program lintas satuan kerja perangkat daerah,
6. Program kewilayahan
7. Rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif

Sumber: Pasal 5 UU 25 Tahun 2004

Fungsi RPJMN

- RPJM Nasional berfungsi sebagai:
 1. Pedoman penyesuaian dalam rangka penetapan Renstra-KL; dan
 2. Bahan penyusunan dan perbaikan RPJM Daerah dengan memperhatikan tugas pemerintah daerah dalam mencapai sasaran nasional yang termuat dalam RPJM Nasional



Sumber: Pasal 17 PP 40/2006

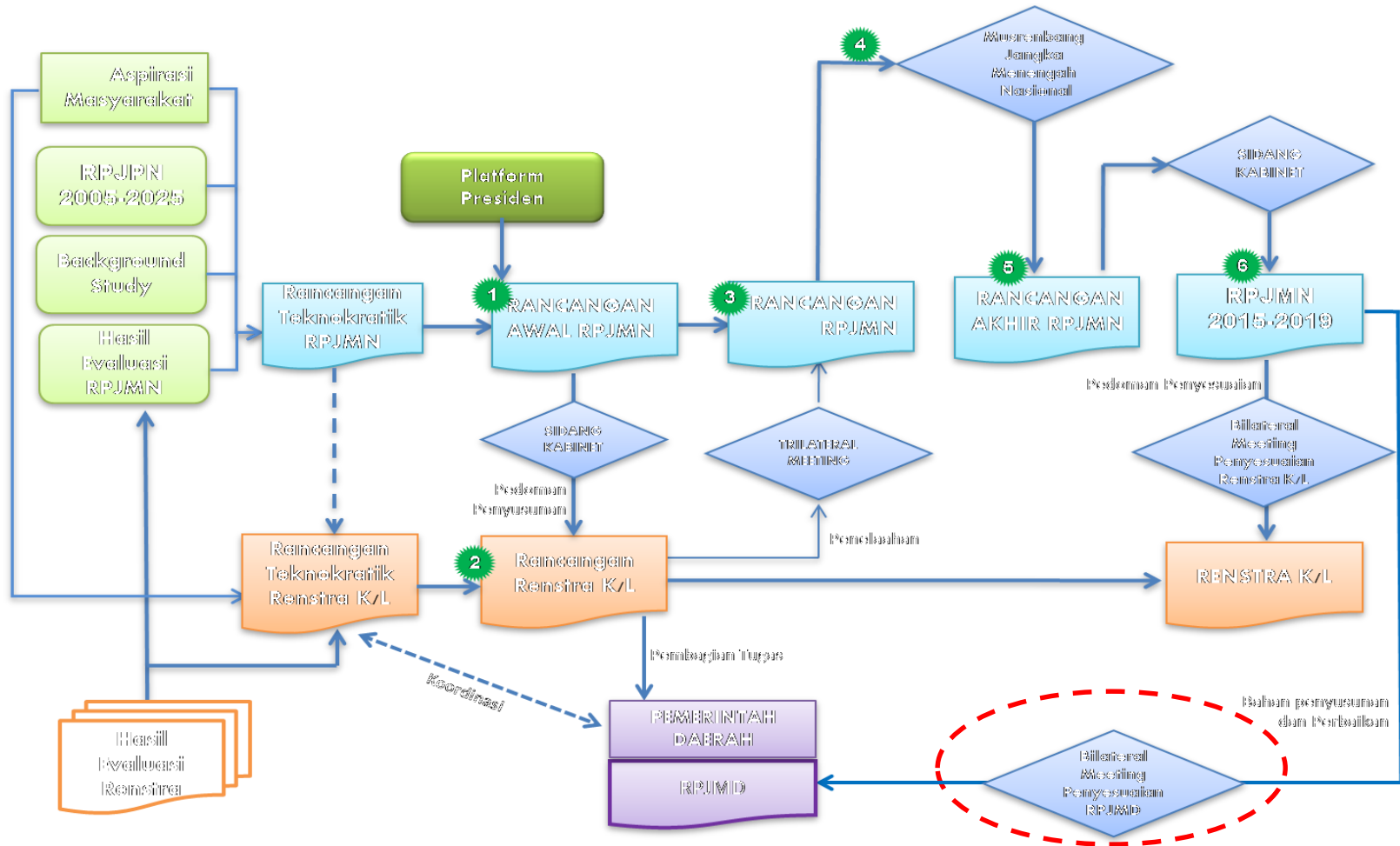
Penyesuaian RPJMD terhadap RPJMN



- Penyesuaian RPJMD dengan RPJMN 2015-2019 dilakukan melalui **Bilateral Meeting Penyesuaian RPJMD** dengan RPJMN 2015-2019.

Sumber: Pasal 14 Permen PPN 1/2014

Alur Penyusunan RPJMN



Sumber: Juklak Sesmen PPN 3/2014

Bilateral Meeting

- ***Bilateral Meeting*** Penyesuaian RPJMD dengan RPJMN 2015-2019 adalah pertemuan dua pihak antara Kementerian Perencanaan dengan Pemerintah daerah Provinsi yang bertujuan untuk menjaga konsistensi sasaran masing-masing **program/kegiatan pokok RPJMD dengan sasaran program/kegiatan strategis nasional**, penyesuaian target dan pendanaannya.



RPJMD tidak mengatur kegiatan pokok di dalamnya

Sumber: Pasal 1 Permen PPN 1/2014

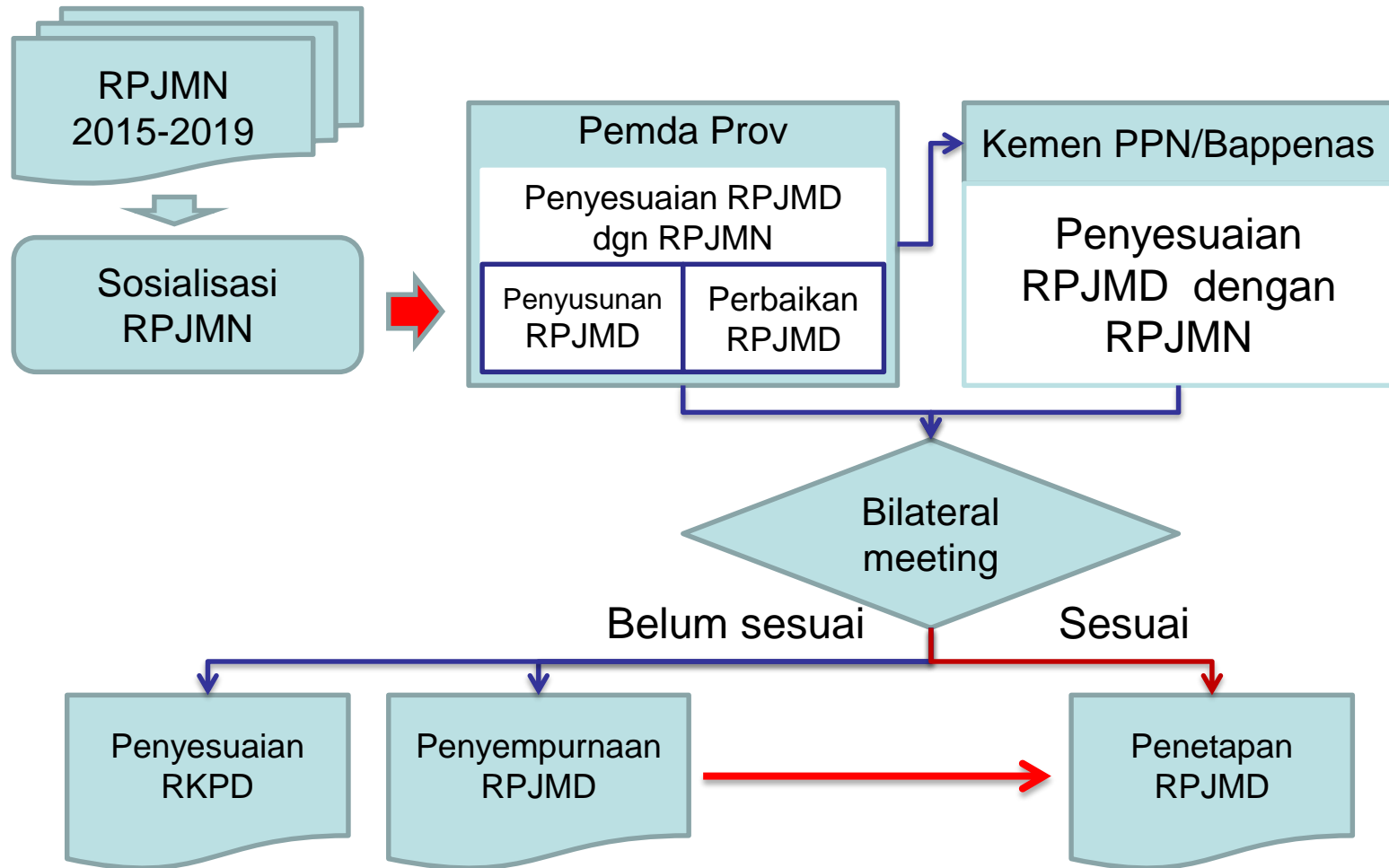
Penyesuaian RPJMD dengan RPJMN 2015-2019



- Tujuan Penyesuaian RPJM Daerah dengan RPJM Nasional 2015-2019:
 1. Menjaga konsistensi dan sinergitas sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 menjadi prioritas dalam RPJMD terkait.
 2. Meningkatkan koordinasi dan kesepahaman dalam rangka mencapai sasaran pembangunan nasional.

Sumber: Anak Lampiran VIII Juklak Sesmen
PPN 3/6/2014

Penyesuaian RPJMD dengan RPJMN 2015-2019



Sumber: Anak Lampiran VIII Juklak Sesmen PPN 3/6/2014

Penyesuaian RPJMD dengan RPJMN 2015-2019

- Penyesuaian RPJMD kepada RPJMN:
 1. Konsistensi Sasaran Pokok RPJMD dengan Sasaran Pokok Nasional
 2. Konsistensi Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Daerah mendukung pencapaian Prioritas Nasional
 3. Penyesuaian Target RPJMD dengan Target Prioritas Nasional Terkait
 4. Penyesuaian Pendanaan yang Dialokasikan
- Khusus untuk kegiatan strategis nasional, RPJMD harus menyesuaikan arah kebijakan dan strategi, sasaran program dan kegiatan yang mendukung kegiatan strategis nasional tersebut.

Sumber: Anak Lampiran VIII Juklak Sesmen
PPN 3/6/2014

Perencanaan Pembangunan Daerah



- Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional
- Rencana pembangunan Daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan diselarasankan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah

Sumber: Pasal 260 UU 23/2014

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

- RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat :
 1. tujuan,
 2. sasaran,
 3. strategi,
 4. Arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah,
 5. program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat
 6. indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
 7. dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Sumber: Pasal 263 UU 23/2014

Perubahan Dokumen Rencana Pembangunan

- RPJPD, RPJMD, dan RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat



Dasar Hukum Perubahan RPJMD untuk
Penyelarasan terhadap RPJMD

Sumber: Pasal 264 UU 23/2014

Evaluasi Rancangan Dokumen Rencana Pembangunan

- Evaluasi terhadap rancangan Perda Provinsi tentang RPJMD yang dilakukan oleh Menteri (*Mendagri*) dilaksanakan untuk
 - menguji kesesuaian dengan RPJPD Provinsi dan RPJMN,
 - kepentingan umum dan/atau
 - ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi



Diperuntukkan bagi RPJMD baru, sedangkan belum ada aturan bagi RPJMD eksisting

Sumber: Pasal 269 UU 23/2014

Keselarasan RPJMD dan RPJM

Strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah (Bab VI RPJMD)



Strategi, kebijakan umum, kerangka ekonomi makro, dan prioritas nasional sebagaimana tercantum dalam Buku I RPJMN 2010-2014;

Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah (Bab VII)



Pencapaian sasaran rencana pembangunan bidang-bidang sebagaimana tercantum dalam Buku II RPJMN 2010-2014;

Pencapaian sasaran program pembangunan jangka menengah daerah (Bab VIII)



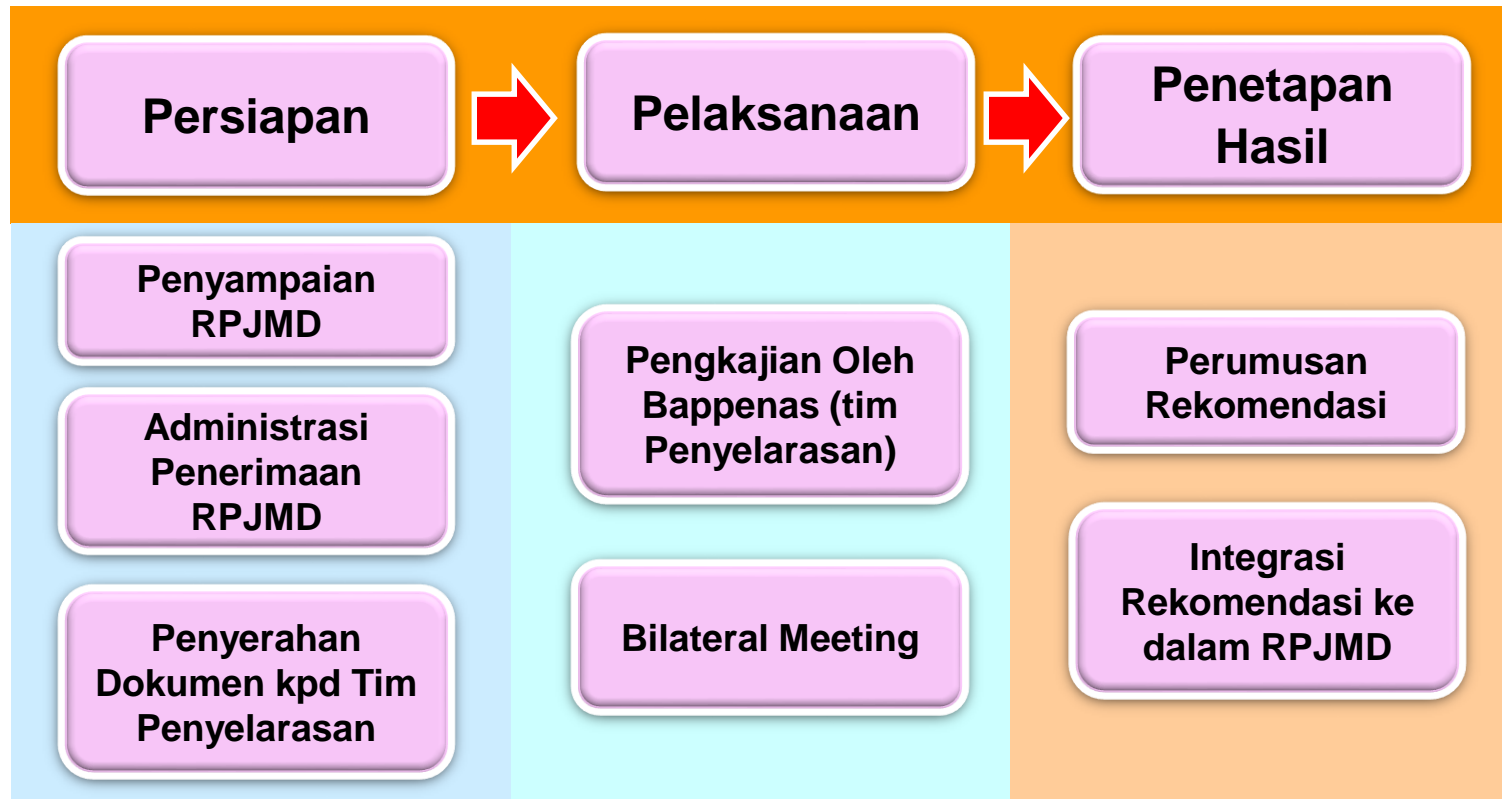
Pencapaian sasaran dan arah pembangunan kewilayahan sebagaimana tercantum dalam Buku III RPJMN 2010-2014.

Sumber: Pasal 3 SEB 3 Menteri/2010

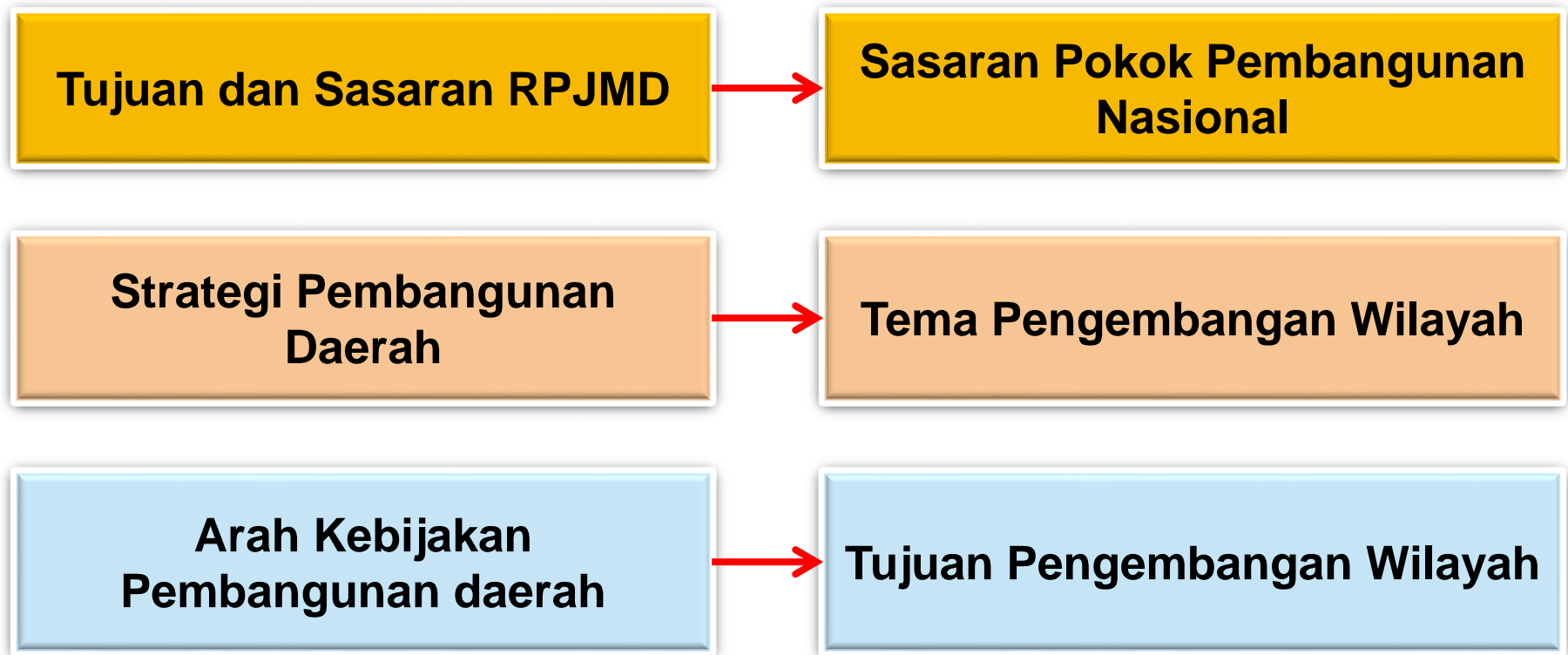
Perangkat Pelaksanaan Penyelarasan



Tahapan Pelaksanaan



Ruang Lingkup Penyelarasan



Penyelarasan Sasaran Makro

Indikator	Target RPJMD	Target RPJMN
Pertumbuhan Ekonomi		
Tingkat Pengangguran		
Tingkat Kemiskinan		



Penyelarasan Sasaran Pokok

Sasaran	Ya	Tidak	Target RPJMD	Rekomendasi Target (hingga akhir periode RPJMD)
I. Sasaran Makro				
Pembangunan Manusia dan Masyarakat				
1. Indeks Pembangunan Manusia				
2. Indeks Pembangunan Masyarakat				
3. Indeks Gini				
4. Meningkatnya presentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan				
4. Kepesertaan Program SJSN Ketenagakerjaan				
- Pekerja Formal				
- Pekerja Informal				
Dst...				

Penyelarasan Strategi

- Penyelarasan Strategi (RPJMD) terhadap Tema Pengembangan Wilayah (RJMN)

Wilayah	Tema Pengembangan	Strategi Pembangunan Daerah
Papua	<ul style="list-style-type: none">• Percepatan pengembangan industri berbasis komoditas lokal yang bernilai tambah di sektor/subsektor pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan;• Dst ...	
Maluku	<ul style="list-style-type: none">• Produsen makanan laut dan lumbung ikan nasional• Dst ...	
dst...		

Penyelarasan Arah Kebijakan

- Penyelarasan arah kebijakan (RPJMD) terhadap Tujuan pengembangan wilayah (RPJMN)

Wilayah	Tujuan Pengembangan	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
Nusa Tenggara	a. pengembangan pariwisata ekologis, serta pengembangan industri berbasis komoditas peternakan terutama sapi, garam, rumput laut, jagung, mangan, dan tembaga; b. penyediaan infrastruktur wilayah; c. dst	
Sulawesi	a. pengembangan industri berbasis logistik, komoditas kakao, jagung, perikanan, padi, rotan, aspal, nikel, bijih besi, dan gas bumi, serta pengembangan pariwisata bahari; b. dst	
Sumatera	a. pengembangan hilirisasi komoditas batu bara, serta pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, timah, bauksit, dan kaolin; b. Dst...	
Dst...		



Simulasi Penyelarasan RPJMD-RPJMN

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional di Provinsi Aceh

Perkeretaapian Diperuntukkan bagi Pengangkutan Penumpang dan Barang

RPJMN	RPJMD
1. Pembangunan Jalur KA Banda Aceh-Lhokseumawe 2. Pembangunan jalur KA Banda Lhokseumawe-Langsa-Besitang 3. Pembangunan jalur KA antara Bireun - Lhokseumawe 4. Pembangunan jalur KA antara Sigli - Bireun (tahap 1)	

PERHUBUNGAN DARAT

RPJMN	RPJMD
1. Revitalisasi Kawasan Terminal di Banda Aceh (Keudah dan Peunayong)	

PERHUBUNGAN UDARA

RPJMN	RPJMD
<ol style="list-style-type: none">1. Pengembangan Bandara Sultan Iskandar Muda2. Pengembangan Bandara Maimun Saleh, Sabang3. Peningkatan Bandara Lasikin4. Peningkatan Bandara Gayo Lues5. Peningkatan Bandara Rambele6. Peningkatan Bandara Cut Nyak Dhien7. Peningkatan Bandara T.Cut Ali	

PERHUBUNGAN LAUT

RPJMN	RPJMD
<ol style="list-style-type: none">1. Pembangunan dan Perluasan Pelabuhan Krueng Geukuh2. Pengembangan Pelabuhan Sabang3. Pembangunan Pelabuhan Malahayati Banda Aceh*4. Pembangunan Pelabuhan Susuh di Teluk Surin Aceh Barat Daya5. Pengembangan Pelabuhan Kuala Langsa6. Pengembangan Pelabuhan Singkil	

JALAN

RPJMN	RPJMD
<ol style="list-style-type: none">1. Pembangunan Jalan Kruengraya-Tibang2. Pembangunan Jalan Gempang - Pameuh3. Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Simelue4. Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Weh (Sabang - Keuneukal)5. Pembangunan Jalan Takengon-Sp.Peut	

ENERGI

RPJMN	RPJMD
1. Revitalisasi kilang LNG Arun 400 mmscfd	

ASDP

RPJMN	RPJMD
1. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Meulaboh* 2. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sinabang 3. Pengembangan Dermaga Penyeberangan P.Banyak	

KETENAGALISTRIKAN

RPJMN	RPJMD
<ol style="list-style-type: none">1. PLTGU/MGU Sumbagut-2 Peaker (Arun) 250 MW2. PLTU Meulaboh #3 200 MW3. Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi	

TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

RPJMN	RPJMD
<ol style="list-style-type: none">1. Pembangunan Serat Optik antar seluruh kabupaten/kota2. Pengembangan transmisi penyiaran TVRI	

SUMBER DAYA AIR

RPJMN	RPJMD
<ol style="list-style-type: none">1. Pembangunan Waduk Jambo Aye Kab. Aceh Utara & Timur2. Pembangunan Waduk Kreuto Aceh Utara3. Pembangunan Waduk Rukoh & Tiro Pidie4. Pembangunan Waduk Lawe Mamas I Aceh Tenggara5. Pembangunan Waduk Lawe Atas Aceh Tenggara6. Pembangunan Waduk Lawe Mamas II Aceh Tenggara7. Integrated Participatory Development and Management Lhok Guci Irrigation Aceh Jaya8. Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Kr. Pase Aceh Utara9. Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Jambo Aye Kanan Aceh Utara10. Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Jamuan (extension) Aceh Utara11. Pembangunan Bendung D.I. Peureulak Aceh Timur12. Pembebasan Lahan D.I. Peureulak & D.I. Lhok Guci Aceh Timur dan Aceh Jaya13. Pembangunan Prasarana Pengendalian Daya Rusak Air Sungai Kr. Singkil Aceh Singkil - Kota Subulussalam14. Pengendalian Banjir Sungai Lawe Bulan Aceh Singkil15. Pengamanan Pantai Permukiman Kota Meulaboh Aceh Barat16. Pengamanan Muara Krueng Peudada Bireun17. Pembangunan Pengamanan Pantai krueng Raya kec. Masjid Raya Aceh Besar18. Pembangunan Intake & Pipa Transmisi Air Baku di Kab. Aceh Utara19. Pembangunan Intake & Pipa Transmisi Air Baku Aceh Singkil20. Pembangunan Intake & Pipa Transmisi Air Baku Nagan Raya21. RESTORASI SUNGAI Sungai Lawe Alas Dan Lawe Bulan A. Tenggara & Aceh Singkil22. RESTORASI SUNGAI Sungai Kr. Baro. Kr. Tiro Dan Krueng Aceh Aceh Besar, Pidie dan Pidie Jaya	

PENDIDIKAN

RPJMN	RPJMD
<ol style="list-style-type: none">1. Science Park Berbasis Kebencanaan di Kota Banda Aceh2. Techno Park berbasis komoditas kopi (di Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meria) dan kakao (Kabupaten Pidie dan Kabupaten Pidie Jaya).3. Techno Park berbasis lobster dan udang di kabupaten Simeulue4. Penambahan 2 rumah budaya	

KESEHATAN

RPJMN	RPJMD
<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan kapasitas RS regional (6 RS)2. Peningkatan fasilitas kesehatan dasar (puskesmas baru, rehabilitasi puskesmas, pusling)3. Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan4. Pemenuhan kebutuhan obat dan vaksin	

Penyelarasan RPJMD-RPJMN dalam Multilateral Meeting

- Koordinasi Perencanaan Multilateral/K/L/D terhadap masing-masing **Agenda Prioritas Nasional (NAWACITA)** meliputi:
 1. Kedaulatan pangan
 2. Kedaulatan energi
 3. Kemaritiman
 4. Industri/Kawasan Industri
 5. Pariwisata
 6. Revolusi mental
 7. Kawasan Perbatasan



1. Kedaulatan Pangan

Kemen Pertanian; Kemen Kehutanan & LH;
Kemen Agraria & TTR; Kemen PU; **Pemda**

Kemendag;
Kemen Pertanian

Kemen Pertanian;
Kemen Perindustrian;
Pemda

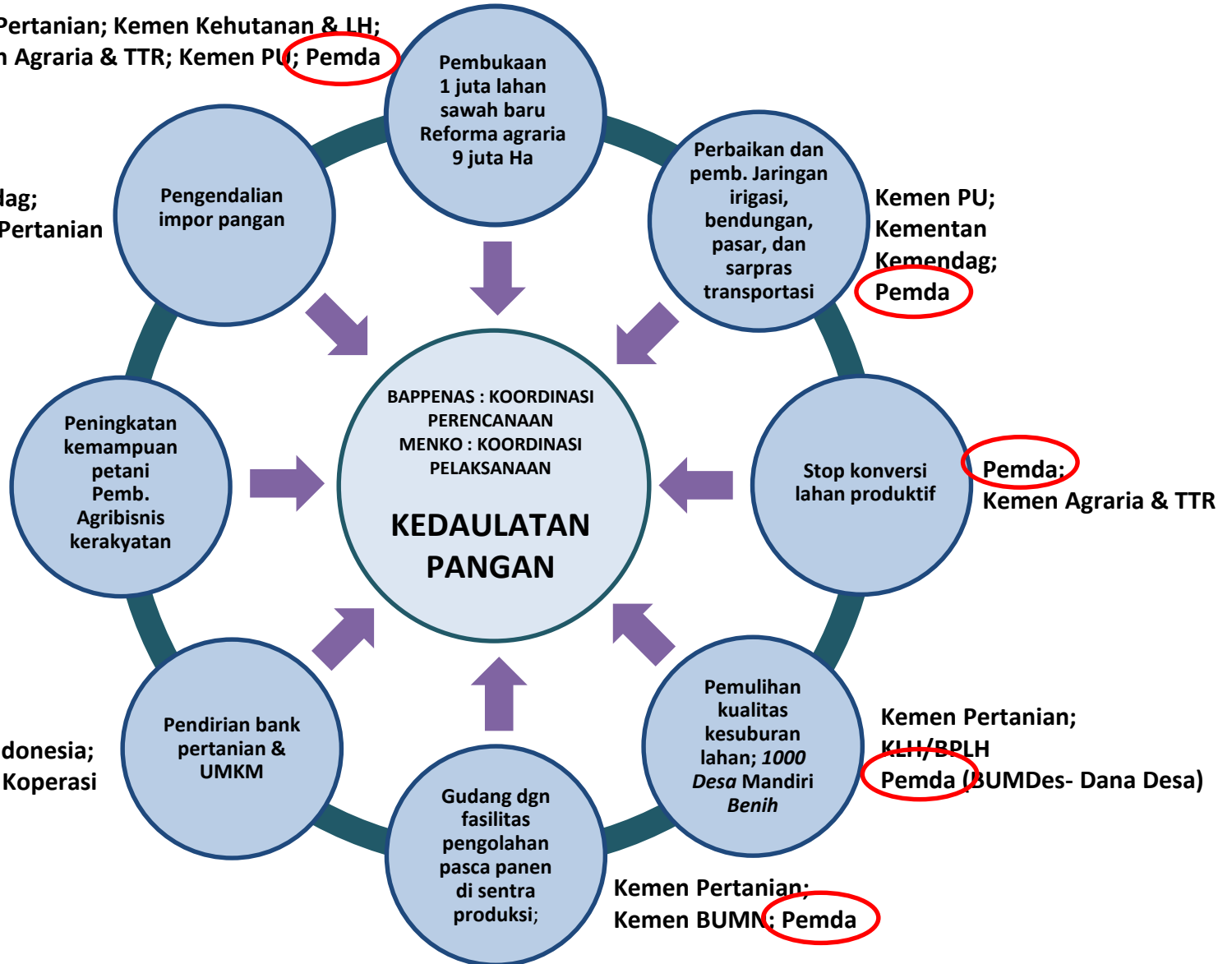
Bank Indonesia;
Kemen Koperasi

Kemen Pertanian;
Kemen BUMN; **Pemda**

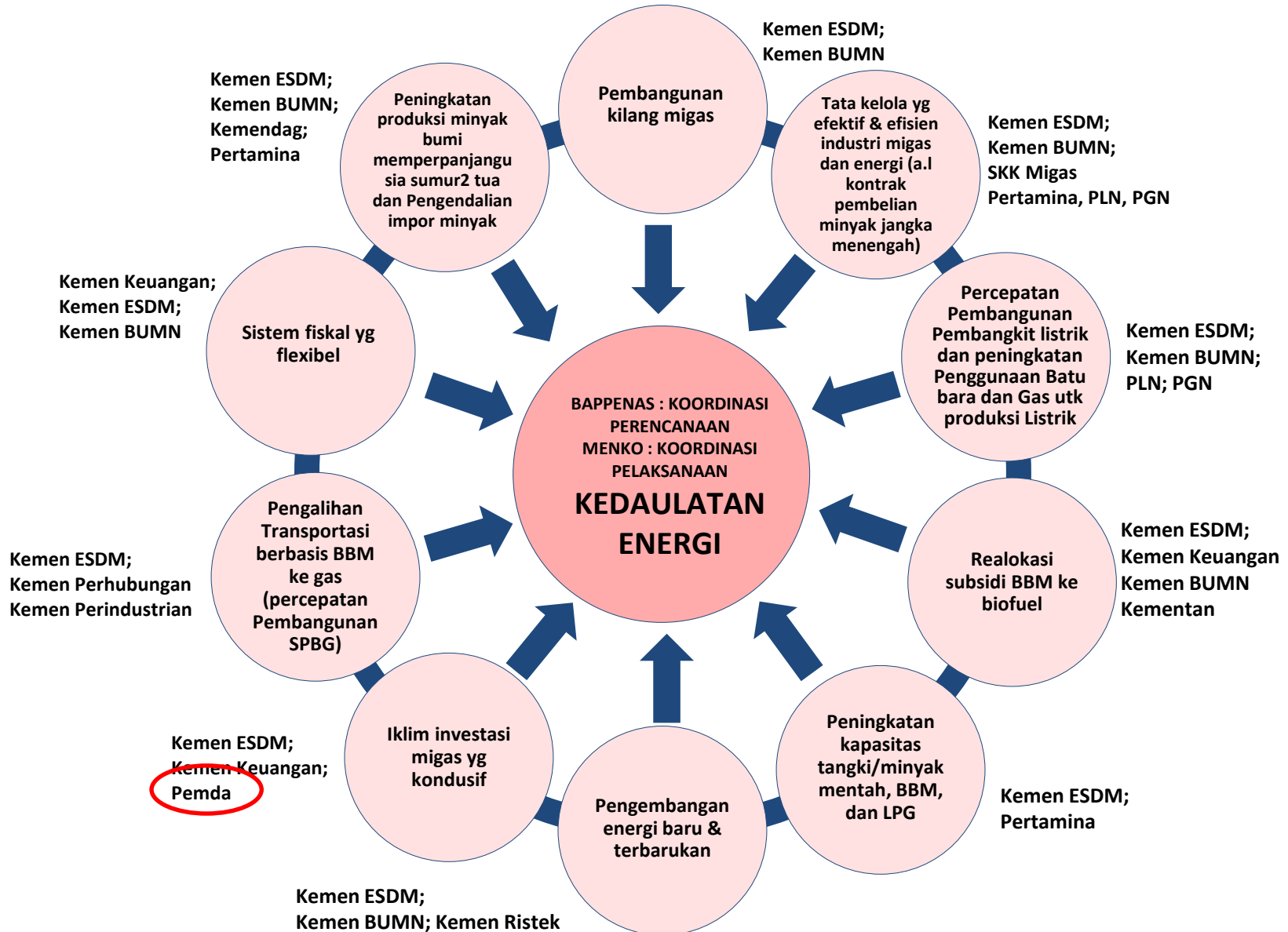
Kemen PU;
Kementan
Kemendag;
Pemda

Pemda;
Kemen Agraria & TTR

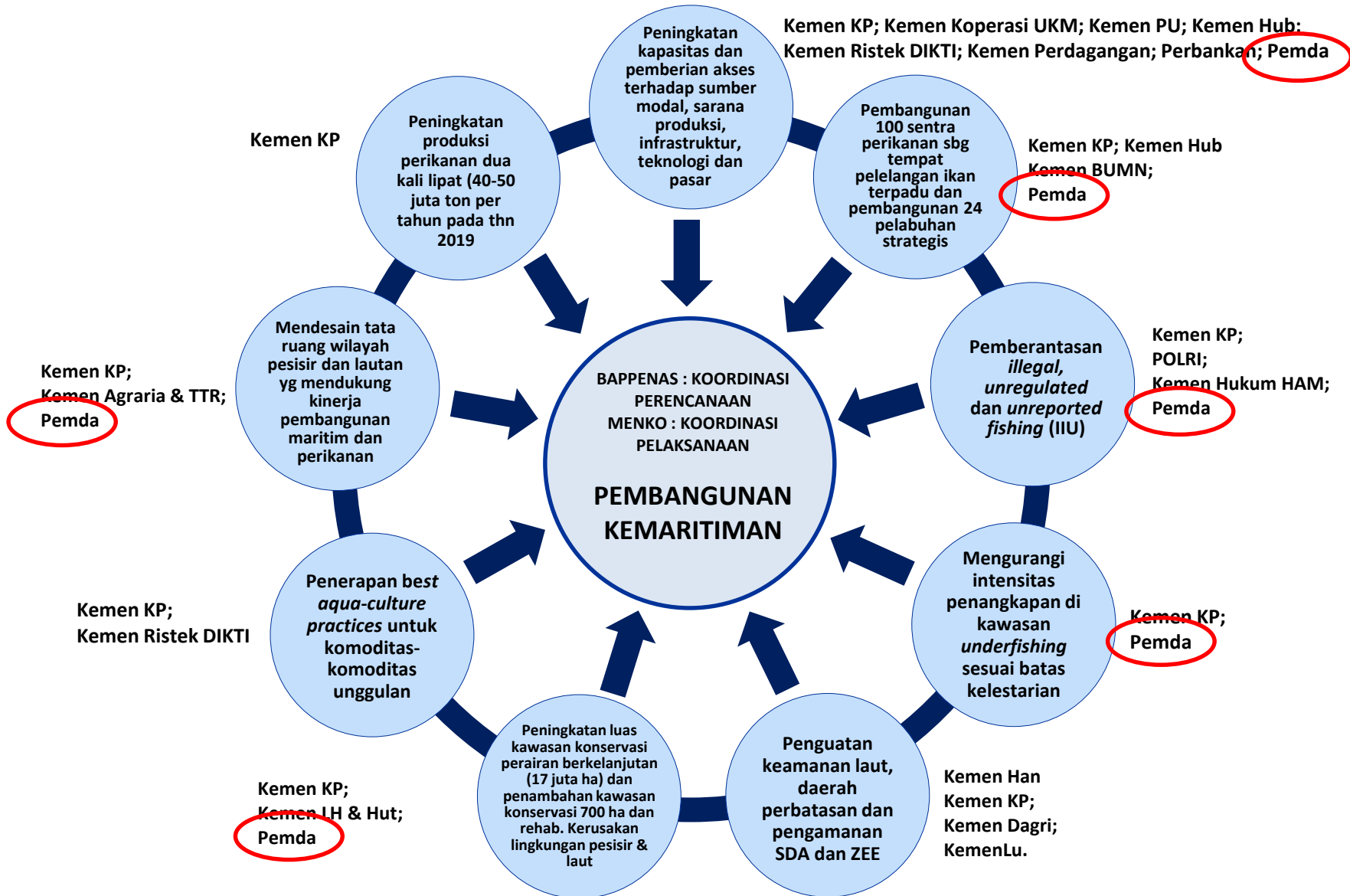
Kemen Pertanian;
KLH/BPLH
Pemda (BUMDes- Dana Desa)



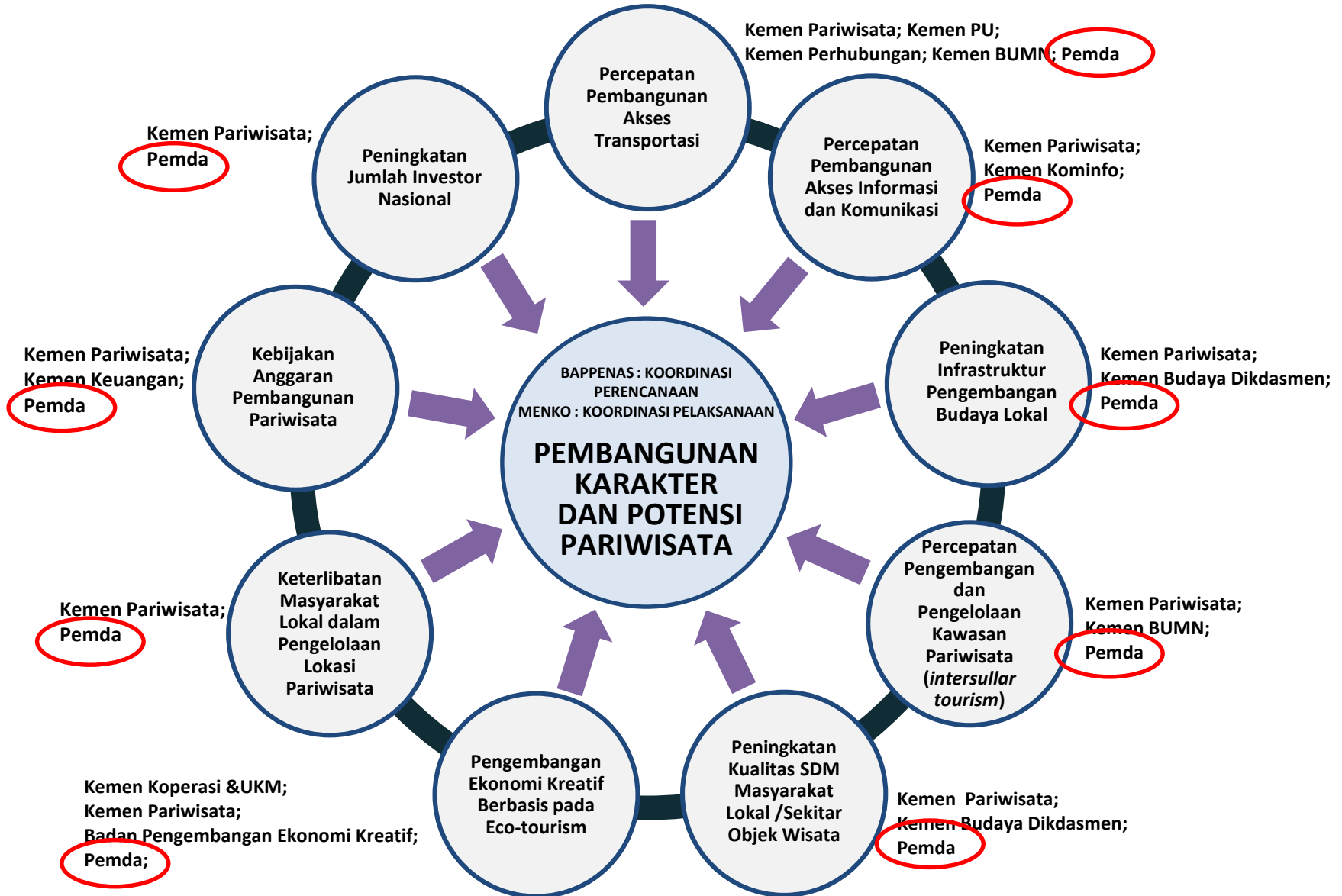
2. Kedaulatan Energi



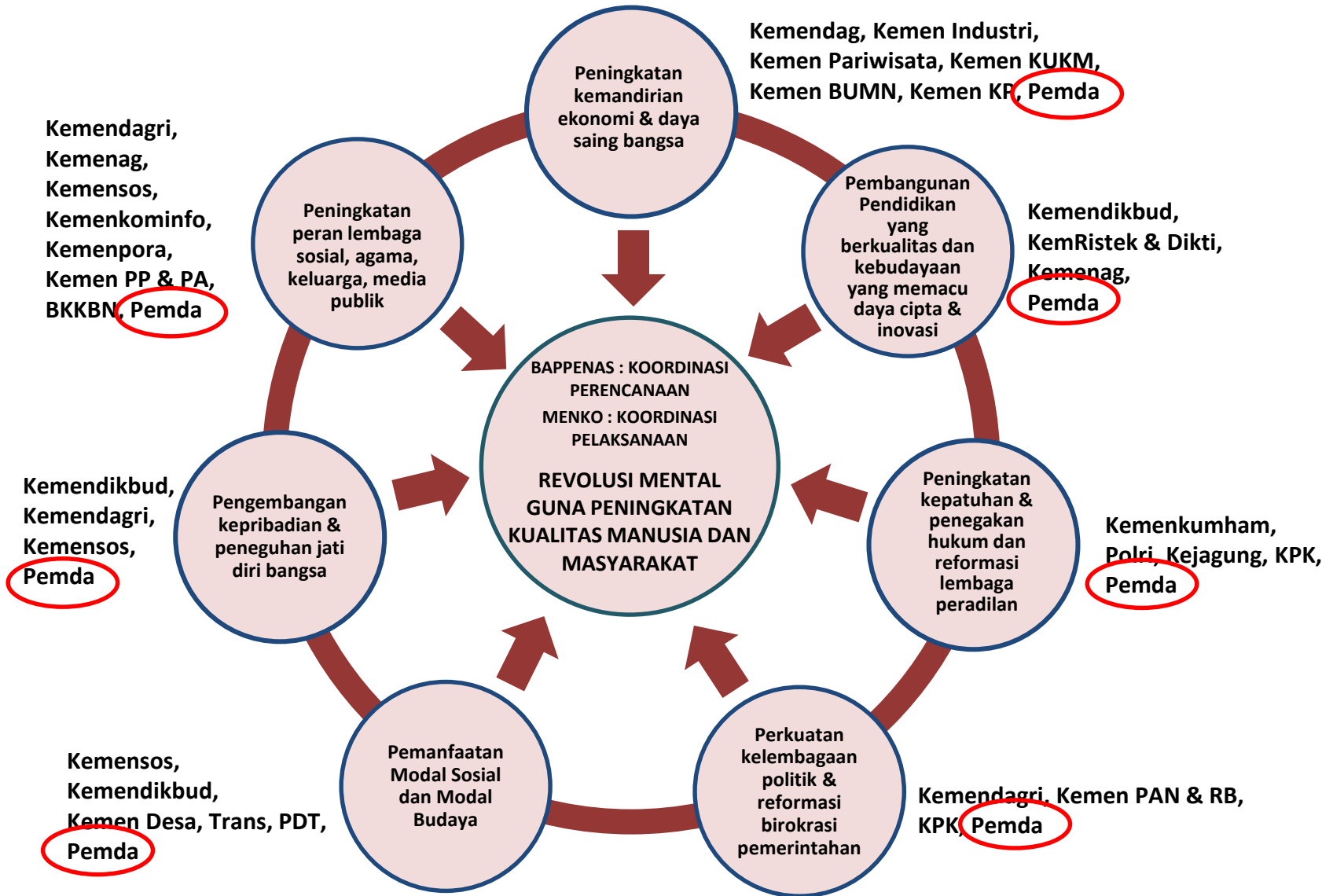
3. Kemaritiman



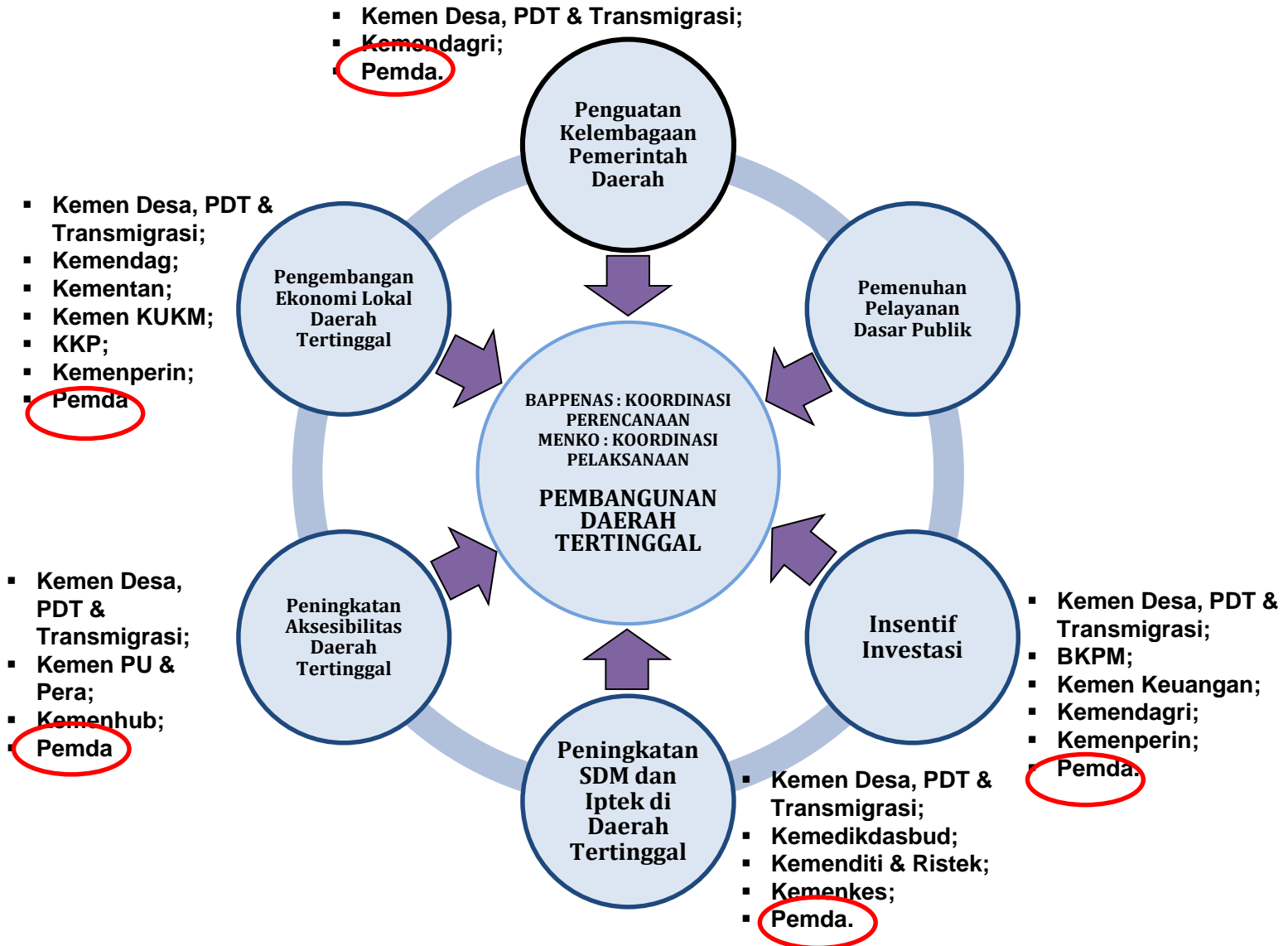
5. Pembangunan Karakter dan Potensi Pariwisata



6. Revolusi Mental



Pembangunan Daerah Tertinggal



A close-up photograph of a person's hands holding a white tablet. The tablet screen displays a business dashboard with various charts, including a bar chart and a pie chart, all in shades of blue. The text "Terima Kasih" is overlaid in large, white, bold letters with a black outline across the center of the screen. The background is blurred, showing a person in a light blue shirt.

Terima Kasih